



Laporan **KEUANGAN**

TAHUN ANGGARAN 2023
(AUDITED)



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA BARAT**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pimpinan Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan disampaikan kepada Gubernur melalui PPKD dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah entitas akuntansi dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan menyusun laporan keuangan berupa Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Tahun 2023 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Neraca menyajikan informasi tentang posisi Aset, Kewajiban, dan Ekuitas.
2. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, dan Pembiayaan.
3. Laporan Operasional menunjukkan informasi Pendapatan-LO dan Beban.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/(Defisit)-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan memberikan uraian tentang kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Tahun 2023 ini masih belum sempurna. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya

untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bandung, 05 Agustus 2024

✍ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ^a
Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	v
Pernyataan Tanggung Jawab.....	vi
Ringkasan	vii
Laporan Realisasi Anggaran.....	xii
Neraca	xiii
Laporan Operasional.....	xiv
Laporan Perubahan Ekuitas	xv
Catatan atas Laporan Keuangan.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi	2
1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD ...	6
2.1 Ekonomi Makro	6
2.2 Kebijakan Strategis	6
2.3 Kebijakan Keuangan.....	7
2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	8
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD.....	10
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD	10
3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	12
3.3 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan	12
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	13
4.1 Entitas Akuntansi	13
4.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	14
4.3 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15

4.4	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	15
4.5	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP.....	26
BAB V	PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	27
5.1	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.1.1	Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran.....	27
5.1.2	Penjelasan per Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	31
5.1.3	Catatan Penting Lainnya	39
5.2	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	40
5.2.1	Penjelasan Umum Neraca	40
5.2.2	Penjelasan per Pos Neraca	40
5.2.3	Catatan Penting Lainnya	49
5.3	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.....	50
5.3.1	Penjelasan Umum Laporan Operasional	50
5.3.2	Penjelasan per Pos Laporan Operasional.....	50
5.3.3	Catatan Penting Lainnya	56
5.4	Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	57
5.4.1	Penjelasan Umum Laporan Perubahan Ekuitas	58
5.4.2	Penjelasan per Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
5.4.3	Catatan Penting Lainnya	60
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN PD	61
BAB VII	PENUTUP	63
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1	Rincian LRA
Lampiran	6	Daftar Saldo Persediaan
Lampiran	7	Daftar Persediaan
Lampiran	8	Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	9	Daftar Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
Lampiran	10	Daftar Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Daerah
Lampiran	15	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Pegawai, Pemeliharaan, Perjalanan Dinas, Hibah, Bantuan Sosial, dan Lain-lain
Lampiran	16	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Persediaan
Lampiran	17	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Jasa
Lampiran	18	Keterkaitan LRA, LO, dan Neraca – Perhitungan Beban Penyusutan
Lampiran	19	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Neraca dan LRA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Neraca; (c) Laporan Operasional (LO); (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Bandung, 05 Agustus 2024

☞ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil *ak*

Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 189 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil ini telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Audited). Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Audited ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran I. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 Audited ini disusun dari laporan keuangan seluruh satuan kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggambarkan perbandingan antara anggaran Tahun 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Pendapatan-LRA pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar atau sebesar persen dari yang dianggarkan sebesar Jumlah realisasi Pendapatan-LRA tersebut seluruhnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah-LRA. Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA pada Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, Pendapatan Retribusi Daerah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA sebesar atau mencapai persen dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau mencapai 91,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 . Jumlah realisasi Belanja tersebut terdiri dari realisasi Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan dan Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar dan Belanja sebesar Rp13.739.631.900,00 diperoleh Surplus/(Defisit)-LRA sebesar (Rp13.739.631.900,00).

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah) :

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)		Tahun Anggaran 2022 (Audited)	
	Anggaran Perubahan	Realisasi	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00	15.524.617.441,00	14.579.956.076,00
Belanja Operasi	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00	15.070.748.941,00	14.148.701.251,00
Belanja Pegawai	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00	9.816.136.003,00	9.112.666.305,00
Belanja Barang dan Jasa	5.013.879.693,00	4.889.717.775,00	5.254.612.938,00	5.036.034.946,00
Belanja Modal	308.660.679,00	288.839.660,00	453.868.500,00	431.254.825,00
Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	304.123.179,00	288.839.660,00	453.868.500,00	431.254.825,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.537.500,00	0,00	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LRA	-14.951.609.670,00	-13.739.631.900,00	-15.524.617.441,00	-14.579.956.076,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya. Jumlah Aset per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.509.736.176,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp12.849.600,00, Aset Tetap sebesar Rp6.496.886.576,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00. Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp8.077.781,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp6.501.658.395,00. Ringkasan Neraca Per 31 Desember 2023 dan Per 31 Desember 2022 dapat disajikan pada tabel berikut dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Lancar	12.849.600,00	5.381.695,00
Aset Tetap	6.496.886.576,00	6.812.497.871,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	6.509.736.176,00	6.817.879.566,00
Kewajiban Jangka Pendek	8.077.781,00	5.664.279,00
Jumlah Kewajiban	8.077.781,00	5.664.279,00
Ekuitas	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.509.736.176,00	6.817.879.566,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menunjukkan kinerja sesungguhnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Tahun Anggaran 2023. Pendapatan-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar , Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.066.125.540,00 , Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran Rp0,00 dan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) . Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO		
Beban	14.066.125.540,00	14.681.778.472,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/(defisit)-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 , Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) , RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 , RA PPKD (Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , RA PPKD (Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.936.748,00 , dan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 . Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Awal	6.812.215.287,00	7.279.622.492,45
Surplus/(Defisit)-LO	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00
RK PPKD	13.739.631.900,00	14.579.956.076,00
RA PPKD (Perolehan)	0,00	0,00
RA PPKD (Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	15.936.748,00	-365.584.809,45

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Akhir	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari Pendapatan – LRA, Belanja dan Pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Sementara itu, dalam penyajian Laporan Operasional yang terdiri dari Pendapatan – LO dan Beban; Neraca yang terdiri dari Aset, Kewajiban, dan Ekuitas diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Daerah. Dalam CaLK ini diungkapkan juga kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

Kode Rekening	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 31-Dec-2023 Audited	Lebih / (Kurang)	%	Realisasi 31-Dec-2022 Audited
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6 = 4 / 3 *100	7
5	Belanja					
5.1	Belanja Operasi	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00	(1.192.156.751,00)	91,86	14.148.701.251,00
5.1.01	Belanja Pegawai	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00	(1.067.994.833,00)	88,91	9.112.666.305,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.013.879.693,00	4.889.717.775,00	(124.161.918,00)	97,52	5.036.034.946,00
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Modal	308.660.679,00	288.839.660,00	(19.821.019,00)	93,58	431.254.825,00
5.2.01	Belanja Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	304.123.179,00	288.839.660,00	(15.283.519,00)	94,97	431.254.825,00
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.04	Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	4.537.500,00	0,00	(4.537.500,00)	0,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pajak ke Kab/Kota	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.00	Jumlah Belanja	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00	(1.211.977.770,00)	91,89	14.579.956.076,00
	SURPLUS / (DEFISIT) - LRA	(14.951.609.670,00)	(13.739.631.900,00)	1.211.977.770,00		(14.579.956.076,00)
6	Pembiayaan					
6.1	Penerimaan Pembiayaan					
6.1.01	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(14.951.609.670,00)	(13.739.631.900,00)	1.211.977.770,00		(14.579.956.076,00)

Bandung, 05 Agustus 2024

➤ KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, *a*


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
NERACA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

No	Uraian	Ref	2023 (Unaudited)	KOREKSI		2023 (Audited)	2022 (Audited)
				D	K		
1	2	3	4	5	6	4	5
1	ASET						
1.1	ASET LANCAR						
1.1.1	Kas di Bendahara Penerimaan		0	0	0	0	0
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran		0	0	0	0	0
	Kas di BLUD		0	0	0	0	0
	Kas Lainnya		0	0	0	0	0
1.1.3	Piutang Pajak Daerah		0	0	0	0	0
1.1.4	Piutang Retribusi Daerah		0	0	0	0	0
1.1.5	Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		0	0	0	0	0
1.1.6	Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		0	0	0	0	0
1.1.7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0	0	0	0	0
1.1.8	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0	0	0	0
1.1.9	Bagian Lancar Piutang Sewa		0	0	0	0	0
1.1.10	Piutang Lain-lain		0	0	0	0	0
1.1.11	Penyisihan Piutang		0	0	0	0	0
	Penyisihan Piutang BLUD		0	0	0	0	0
1.1.12	Beban Dibayar Dimuka		0	0	0	0	0
1.1.13	Persediaan		12.849.600	0	0	12.849.600	5.381.695
	Persediaan BLUD		0	0	0	0	0
	Jumlah Aset Lancar		12.849.600	0	0	12.849.600	5.381.695
1.2	ASET TETAP						
1.2.1	Tanah		5.138.640.000	0	0	5.138.640.000	5.138.640.000
1.2.2	Peralatan dan Mesin		7.973.956.834	0	0	7.973.956.834	7.685.117.174
1.2.3	Gedung dan Bangunan		5.354.291.538	0	0	5.354.291.538	5.354.291.538
1.2.4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		67.202.000	0	0	67.202.000	67.202.000
1.2.5	Aset Tetap Lainnya		0	0	0	0	0
1.2.6	Konstruksi dalam Pengerjaan		0	0	0	0	0
1.2.7	Akumulasi Penyusutan		-12.037.203.796	0	0	-12.037.203.796	-11.432.752.841
	Jumlah Aset Tetap		6.496.886.576	0	0	6.496.886.576	6.812.497.871
1.3	ASET LAINNYA						
1.3.1	Tagihan Jangka Panjang		0	0	0	0	0
1.3.2	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran		0	0	0	0	0
1.3.3	Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0	0	0	0	0
1.3.4	Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa		0	0	0	0	0
1.3.5	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0	0	0	0	0
1.3.6	Aset Tidak Berwujud		0	0	0	0	0
1.3.7	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0	0	0	0	0
1.3.8	Aset Lain-lain		0	0	0	0	0
1.3.9	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		0	0	0	0	0
	Jumlah Aset Lainnya		0	0	0	0	0
	JUMLAH ASET		6.509.736.176	0	0	6.509.736.176	6.817.879.566
2	KEWAJIBAN						
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
2.1.1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0	0	0	0	0
2.1.2	Pendapatan Diterima Dimuka		0	0	0	0	0
2.1.3	Utang Belanja		8.077.781	0	0	8.077.781	5.664.279
2.1.4	Utang Jangka Pendek Lainnya		0	0	0	0	0
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		8.077.781	0	0	8.077.781	5.664.279
	JUMLAH KEWAJIBAN		8.077.781	0	0	8.077.781	5.664.279
3	EKUITAS		6.501.658.395	0	0	6.501.658.395	6.812.215.287
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		6.509.736.176	0	0	6.509.736.176	6.817.879.566

Bandung, 05 Agustus 2024
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,


 dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
 NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF	TAHUN ANGGARAN 2023 (UNAUDITED)	Kore		TAHUN ANGGARAN 2023 (AUDITED)	TAHUN ANGGARAN 2022 (AUDITED)	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
				D	K				
1	2	3	4	5	6	4	5	6=(4-5)	7= (4/5)x100%
I	KEGIATAN OPERASIONAL								
II	BEBAN								
II.1	BEBAN OPERASI	5.4.2.2							
	Beban Pegawai	5.4.2.2.1	8.558.653.033	0	0	8.558.653.033	9.112.666.305	-554.013.272	-6,08
	Beban Persediaan	5.4.2.2.2	473.132.707	0	0	473.132.707	550.229.311	-77.096.604	-14,01
	Beban Jasa	5.4.2.2.3	1.782.894.069	0	0	1.782.894.069	1.609.843.735	173.050.334	10,75
	Beban Pemeliharaan	5.4.2.2.4	232.953.478	0	0	232.953.478	412.727.172	-179.773.694	-43,56
	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.2.5	2.394.723.118	0	0	2.394.723.118	2.346.265.708	48.457.410	2,07
	Beban Bunga	5.4.2.2.6		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Subsidi	5.4.2.2.7		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Hibah	5.4.2.2.8		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.2.9		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.2.10	623.769.135	0	0	623.769.135	638.480.041	-14.710.906	-2,30
	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.2.11		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Transfer	5.4.2.2.12		0	0	0	0	0	0,00
	Beban Lain-lain	5.4.2.2.13		0	0	0	11.566.200	-11.566.200	-100,00
	Jumlah Beban Operasi		14.066.125.540	0	0	14.066.125.540	14.681.778.472	-615.652.932	-4,19
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.2.3	-14.066.125.540	0	0	-14.066.125.540	-14.681.778.472	615.652.932	-4,19
II.2	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.2.4							
	SURPLUS NON OPERASIONAL	5.4.2.4.1							
	Surplus Penjualan Aset Non Lancar			0	0	0	0	0	0,00
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0	0	0	0	0	0,00
	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Surplus Non Operasional			0	0	0	0	0	0,00
II.3	DEFISIT NON OPERASIONAL	5.4.2.4.2							
	Defisit Penjualan Aset Non Lancar			0	0	0	0	0	0,00
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang			0	0	0	0	0	0,00
	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Defisit Non Operasional			0	0	0	0	0	0,00
	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL			0	0	0	0	0	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.2.5	-14.066.125.540	0	0	-14.066.125.540	-14.681.778.472	615.652.932	-4,19
III	POS LUAR BIASA	5.4.2.6							
III.1	PENDAPATAN LUAR BIASA								
	Pendapatan Luar Biasa			0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Pendapatan Luar Biasa			0	0	0	0	0	0,00
III.2	BEBAN LUAR BIASA								
	Beban Luar Biasa			0	0	0	0	0	0,00
	Jumlah Beban Luar Biasa			0	0	0	0	0	0,00
	POS LUAR BIASA			0	0	0	0	0	0,00
IV	SURPLUS/DEFISIT LO	5.4.2.7	-14.066.125.540	0	0	-14.066.125.540	-14.681.778.472	615.652.932	-4,19

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Bandung, 05 Agustus 2024
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
NIP. 19661020 199803 1 003

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023

URAIAN	UNAUDITED 2023	KOREKSI REVIU		AUDITED 2023	AUDITED 2022
		DEBIT	KREDIT		
EKUITAS AWAL	6.812.215.287	0	0	6.812.215.287	7.279.622.492
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	-14.066.125.540	0	0	-14.066.125.540	-14.681.778.472
RK PPKD	13.739.631.900	0	0	13.739.631.900	14.579.956.076
EKUITAS	15.936.748	0	0	15.936.748	-365.584.809
KOREKSI SALDO AWAL KAS	0	0	0	0	0
KAS LAINNYA (BLUD)	0	0	0	0	0
KOREKSI SETORAN KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN TAHUN LALU	0	0	0	0	-365.069.079
KOREKSI SETORAN KAS DI BP TAHUN LALU	0	0	0	0	0
KOREKSI PIUTANG	0	0	0	0	0
KOREKSI PENYISIHAN PIUTANG	0	0	0	0	0
PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0	0	0	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	-960.000	0	0	-960.000	0
KOREKSI INVESTASI PERMANEN	0	0	0	0	0
KOREKSI KEMITRAAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG SEWA	0	0	0	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TPA	0	0	0	0	0
KOREKSI BAGIAN LANCAR PIUTANG TGR	0	0	0	0	0
EKUITAS - KOREKSI KDP	0	0	0	0	0
EKUITAS - KOREKSI PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	0	0	0	0	0
KOREKSI PENCATATAN PENYERTAAN MODAL DAERAH	0	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET TETAP	0	0	0	0	3
KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	19.318.180	0	0	19.318.180	-515.734
KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET TAK BERWUJUD	0	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET LAIN-LAIN	0	0	0	0	0
KOREKSI AMORTISASI ASET TIDAK BERWUJUD	0	0	0	0	0
KOREKSI PENYUSUTAN ASET LAIN-LAIN	0	0	0	0	0
KOREKSI KEWAJIBAN	0	0	0	0	0
KOREKSI UTANG BELANJA	-2.421.432	0	0	-2.421.432	0
KOREKSI LAIN-LAIN PAD YANG SAH	0	0	0	0	0
KOREKSI KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0	0	0	0	0
KOREKSI BEBAN BARANG DAN JASA	0	0	0	0	0
KOREKSI NILAI EKSTRAKOMTABEL	0	0	0	0	0
LAIN - LAIN	0	0	0	0	0
PEMBAYARAN PIUTANG BAGIAN LANCAR TGR	0	0	0	0	0
PEMBAYARAN PIUTANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0
EKUITAS AKHIR	6.501.658.395	0	0	6.501.658.395	6.812.215.287

Bandung, 05 Agustus 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, a


dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
 NIP. 19661020.199803.1.003

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Perangkat Daerah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Perangkat Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
16. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.3 INFORMASI UMUM TENTANG ENTITAS AKUNTANSI

Domisili dan Bentuk Hukum Entitas serta Jurisdiksi Tempat Entitas Berada

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan pada tanggal 22 November 2016 beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2 Telepon (022) 2031044-2031045 Fax. 2031024 Website : <http://disdukcapil.jabarprov.go.id> E-mail : dukcapil@Jabarprov.go.id Bandung – 40132.

Sifat Operasi Entitas dan Kegiatan Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil melaksanakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 57 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan beberapa modifikasi dan penambahan yang dianggap perlu untuk tujuan kelengkapan dalam pelaporan keuangan, sebagai berikut:

Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Informasi Umum tentang Entitas Akuntansi
- 1.4 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Strategis, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Strategis
- 2.3 Kebijakan Keuangan
- 2.4 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD
- 3.2 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.3 Hambatan dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi
- 4.2 Pendekatan penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.5 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran

- 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.2 Penjelasan atas Pos-Pos Neraca
 - 5.3.4 Penjelasan Umum Neraca
 - 5.3.5 Penjelasan Per Pos Neraca
 - 5.3.6 Catatan Penting Lainnya
- 5.3 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Penjelasan Umum Laporan Operasional
 - 5.3.2 Penjelasan Per Pos Laporan Operasional
 - 5.3.3 Catatan Penting Lainnya
- 5.4 Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.1 Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.4.2 Catatan Penting Lainnya

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non-Keuangan Perangkat Daerah

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN STRATEGIS, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

Indikator makro yang mempengaruhi perumusan strategi dan penyusunan anggaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sasaran, indikator sasaran, dan program yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ Perangkat Daerah) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat serta Rencana Strategis dan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan.

Rencana Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6
2	Program Pendaftaran Penduduk	2
3	Program Pencatatan Sipil	1
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	1
JUMLAH		12

2.2 KEBIJAKAN STRATEGIS

Salah satu instrumen untuk dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima adalah perumusan perencanaan strategik. Dengan perumusan perencanaan strategik yang dikomunikasikan kepada seluruh lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Perencanaan strategik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan

dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Visi

Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”.

Misi

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota”.

Visi dan Misi diatas diterjemahkan dalam beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diatas, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat melaksanakan upaya sebagai-berikut :

1. Meningkatkan Penataan Data Kependudukan;
2. Meningkatkan Pemanfaatan Data Kependudukan Skala Provinsi dan Inovasi Pelayanan;
3. Meningkatkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan;

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan penyusunan laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, pengambilan keputusan serta menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

2.3 KEBIJAKAN KEUANGAN

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Sedangkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022;
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
6. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Dan Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 155 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 98 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 160 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 185 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

2.5 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah) dan pemberi amanah (Gubernur Provinsi Jawa Barat) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dibawah ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023 :

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran IKU	Target Tahun ke-				
			1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Tingkat Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten/Kota Di Jawa Barat	81.83	82.63	83.47	84.28	82.30

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari Perencanaan Kinerja Tahunan sangat penting dilakukan oleh Pimpinan Instansi di lingkungan pemerintahan, karena merupakan wahana proses dalam memberikan perspektif mengenai hal yang diinginkan untuk dihasilkan Perjanjian Kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan Perencanaan Kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil akan lebih baik. Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 - 2023, dan mengacu pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PERANGKAT DAERAH

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET APBD

Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 .

Rincian Belanja Tahun Anggaran 2023 berdasarkan jenis belanjanya adalah sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.642.948.991,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.629.069.298,00 .
 2. Belanja Barang dan jasa sebesar Rp4.889.717.775,00 atau 97,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 .
- b. Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp308.660.679,00 , terdiri dari:
 1. Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 atau 94,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp304.123.179,00 .
 2. Belanja Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.537.500,00 .

Ringkasan Laporan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022 dapat disajikan sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%	6
1	Belanja Operasi	14.642.948.991,00	13.450.792.240,00	91,86	14.148.701.251,00
	- Belanja Pegawai	9.629.069.298,00	8.561.074.465,00	88,91	9.112.666.305,00
	- Belanja Barang & jasa	5.013.879.693,00	4.889.717.775,00	97,52	5.036.034.946,00

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun Anggaran 2023	%	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
2	Belanja Modal	308.660.679,00	288.839.660,00	93,58	431.254.825,00
	- Belanja Peralatan dan Mesin	304.123.179,00	288.839.660,00	94,97	431.254.825,00
	- Belanja Aset Tetap Lainnya	4.537.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	14.951.609.670,00	13.739.631.900,00	0,00	14.579.956.076,00

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 , berarti realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp - 840.324.176,00 atau -5,76 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan belanja pada tahun 2023 belum optimal disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.067.994.833,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.
2. Sisa Rp. 124.161.918,00 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia.
3. Sisa Rp. 15.283.519,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin hasil Negosiasi dengan Penyedia.
4. Sisa Rp. 4.537.500,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi.

Surplus/(Defisit)-LRA

Surplus/(Defisit)-LRA Tahun Anggaran 2023 dihasilkan dari pengurangan antara Realisasi Pendapatan-LRA dan Realisasi Belanja, yaitu Surplus/(Defisit)-LRA sebesar Rp - 13.739.631.900,00.

3.2 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beban

Beban pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 14.066.125.540,00. Rincian berdasarkan jenis beban adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Beban Pegawai	9.112.666.305,00	8.558.653.033,00
Beban Persediaan	550.229.311,00	473.132.707,00
Beban Jasa	1.609.843.735,00	1.782.894.069,00
Beban Pemeliharaan	412.727.172,00	232.953.478,00
Beban Perjalanan Dinas	2.346.265.708,00	2.394.723.118,00
Beban Hibah	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	638.480.041,00	623.769.135,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Lain-lain	11.566.200,00	0,00
Jumlah	14.681.778.472,00	14.066.125.540,0 0

3.3 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITENTUKAN

Persentase Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar 91,89 persen. Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, hal ini disebabkan karena:

1. Efisiensi Anggaran, dan output sudah tercapai.
2. Terdapat sisa anggaran dari belanja yang tidak dapat dipergunakan.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI

Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil beserta jenjang struktural dibawahnya merupakan entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan.

Untuk Tahun Anggaran 2023, entitas akuntansi pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil mencakup:

No	Bidang/Bagian/Satker	Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker
1	Kepala Dinas	-
2	Sekretariat	1 Subbag
3	Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan (FPAK)	-
4	Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK)	-
Jumlah Subbid/Subbag/Subsatker		1 Subbag

Sedangkan penyelenggaraan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang meliputi pencatatan barang milik daerah (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan akun laporan neraca dilakukan oleh Pengurus Barang dan Pengurus Barang Pembantu, yang mencakup:

No	Pengelola BMD	Jumlah
1	Kasubbag Umum/Pegawai/ Perencanaan dan Keuangan	1 Orang
2	Pengurus Barang	1 Orang
3	Pengurus Barang Pembantu	2 Orang
Total		4 Orang

4.2 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh entitas akuntansi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya. Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun berdasarkan proses akuntansi yang menghasilkan data/laporan keuangan dari seluruh satuan kerja beserta jenjang struktural dibawahnya yang ada pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

Laporan Keuangan yang disajikan dihasilkan melalui proses akuntansi keuangan dan proses pencatatan barang milik daerah.

Proses akuntansi dan pencatatan tersebut dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari Pendapatan-LRA dan Belanja

2. Neraca

Neraca disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun neraca dari seluruh unit kerja yang berada dibawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Operasional dari seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Surplus dan Defisit-LO.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan perhitungan akuntansi yang menghasilkan saldo akun-akun Laporan Perubahan Ekuitas seluruh unit kerja yang berada di bawah Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.

5. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pendekatan penyusunan laporan keuangan, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta dalam rangka pengungkapan yang memadai.

4.3 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil disusun menggunakan basis akrual untuk pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan dari Kas Umum Daerah.

Sedangkan untuk pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan menggunakan basis kas pada Laporan Realisasi Anggaran, yaitu diakui pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Daerah atau di Bendahara Penerimaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil atau saat kas dibayar dari Kas Umum Daerah.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran I. Dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

4.4 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan-LRA diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau SK PERANGKAT DAERAH atau entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas dicatat berdasarkan azas bruto tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pendapatan-LRA dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LRA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah. Belanja dinilai sebesar nilai tercatat. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas Belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

(3) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai yang tertera pada dokumen pendukung pendapatan berdasarkan azas bruto. Pendapatan-LO dinilai sebesar nilai tercatat. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi sumber pendapatan.

Dengan basis akrual, Pendapatan-LO diakui jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Timbulnya hak atas pendapatan;
- 2) Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa penerimaan kas di Bendahara Penerimaan atau di Rekening Kas Umum Daerah maupun sumber daya ekonomi non kas yang diterima oleh entitas.

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan. Beban disajikan pada Laporan Operasional berdasarkan klasifikasi ekonomi.

(5) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dikategorikan sebagai aset non lancar.

1. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika (1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan, atau (2) berupa kas dan setara kas.

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, dan beban dibayar di muka.

Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca.

Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar nilai perolehan, yaitu jumlah uang yang ditempatkan atau dikeluarkan untuk memperoleh investasi tersebut. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri, ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga (saham dan obligasi jangka pendek) diperoleh tanpa biaya perolehan maka investasi itu dinilai berdasarkan nilai wajar yaitu harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham (deposito jangka pendek) diukur sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Pengukuran **Piutang** dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi yang menjadi hak Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Piutang dinilai sebesar jumlah yang dapat direalisasikan, setelah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih, dan penghapusan piutang. Piutang pada tanggal Neraca disajikan secara wajar sesuai dengan nilai piutang yang dapat ditagih (net realizable value). Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak.

Untuk menghasilkan nilai piutang secara wajar maka dilakukan **Penyisihan Piutang Tak Tertagih**. Pada akhir periode anggaran dilakukan analisis atas kemungkinan nilai piutang yang dapat ditagih maupun yang tidak dapat ditagih. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang didasarkan pada umur piutang, dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun penentuan besaran yang akan disisihkan, karena jenis piutang sangat bervariasi

dan kemungkinan tidak tertagih juga sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik piutang yang bersangkutan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang. Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (balance sheet), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (aging schedule). Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitemnya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat:

- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; atau
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah

Pengukuran Persediaan adalah sebagai berikut:

- a. Harga perolehan jika Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan;
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;

- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*);
- d. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Persediaan dinilai dengan metoda Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau *First In First Out* (FIFO).

Persediaan biologis adalah persediaan yang mengalami pertumbuhan, seperti hewan dan tumbuhan. Pada saat perolehan pertama kali, aset biologis diukur dengan:

- a. Harga perolehan, atau
- b. Nilai wajar jika harga perolehan tidak tersedia.

Pada saat terjadi transformasi biologis, maka aset biologis akan diukur sebesar nilai wajar. Contohnya sapi yang melahirkan anak maka anak sapi tersebut diukur sebesar nilai wajar.

Persediaan biologis diukur setiap akhir periode akuntansi berdasarkan nilai wajar. Selisih nilai wajar akibat transformasi biologis akan diakui sebagai:

- a. Pendapatan non operasional, jika terjadi penambahan nilai wajar; dan
- b. Beban non operasional, jika terjadi pengurangan nilai wajar.

Nilai Wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari aset Pemerintah Daerah yang merupakan klaim pihak tertentu yang pelunasannya dalam bentuk selain kas. Beban Dibayar Dimuka timbul akibat pembelian (belanja) barang/Jasa atau aktiva lain yang belum diterima atau belum sepenuhnya diterima oleh Pemda.

2. Aset Non Lancar

Aset Non Lancar meliputi semua aset selain yang termasuk pada dua kriteria aset lancar. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tidak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang

digunakan masyarakat umum. Aset Non Lancar meliputi Investasi jangka panjang, Aset tetap, Dana Cadangan dan Aset lainnya.

1. **Investasi Jangka Panjang**

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi non permanen dan investasi permanen.

(i) **Investasi Non Permanen**

Investasi Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi Non Permanen meliputi:

- (1) pinjaman kepada perusahaan negara;
- (2) pinjaman kepada perusahaan daerah;
- (3) pinjaman kepada pemerintah daerah lainnya;
- (4) investasi dalam surat utang negara;
- (5) investasi dalam proyek pembangunan;
- (6) investasi nonpermanen lainnya.

(ii) **Investasi Permanen**

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal di perusahaan daerah dan di perusahaan negara.

Investasi Permanen dinilai menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penilaian investasi permanen dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan Metode biaya; Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

2. Aset Tetap

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Aset Tetap dilaporkan pada neraca Badan Pendapatan Daerah per 31 Desember 2023 berdasarkan harga perolehan dan/atau berdasarkan penilaian kembali oleh Tim Penertiban Aset BMD.

Aset Tetap dinilai sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Belanja Modal yang nilainya dibawah batas minimal kapitalisasi aset tetap, tidak disajikan sebagai aset tetap di Neraca, namun dicatat tersendiri sebagai *Extracomptable*.

Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Suatu pengeluaran dikapitalisasi menjadi aset tetap, jika memenuhi kriteria :

- a. Dibayarkan melalui mekanisme belanja modal;
- b. Jumlah pengeluaran minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) unit barang;
- c. Jumlah pengeluaran minimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk per grup;
- d. Aset yang diperoleh memenuhi kriteria aset tetap.

Aset tetap, kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, disusutkan untuk menunjukkan penurunan nilai dan manfaatnya. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu

aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus.

3. Dana Cadangan

Dana Cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Pembentukan Dana Cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D LS terkait pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

4. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan Dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak berwujud, dan Aset Lain-lain.

Tagihan Jangka Panjang terdiri atas Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa.

(i) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran* menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

(ii) *Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah*

menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

(iii) Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa

menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari sewa aset pemerintah daerah kepada pihak ketiga yang jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dari tanggal neraca. Tagihan Bagian Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran, Tagihan Bagian Jangka Panjang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dan Tagihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Aset Lainnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga dapat berupa Pihak Ketiga-Sewa yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) yang dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji, Bangun Guna Serah (BGS)/ *Build Operate Transfer* (BOT) yang dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut, atau Bangun Serah Guna (BGS)/ *Build Transfer Operate* (BTO) yang dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Aset kerjasama/kemitraan selain tanah dilakukan penyusutan dengan metode garis lurus. Masa manfaat dan nilai residu dipersamakan dengan masa manfaat dan nilai residu jenis aset yang sama di Aset Tetap

Aset Tidak Berwujud adalah aset nonkeuangan, termasuk hak atas kekayaan intelektual, yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki oleh Pemerintah Provinsi untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tidak Berwujud, suatu aset harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Aset nonkeuangan;
- b. Tidak berwujud;
- c. Biaya perolehan dapat diukur secara andal;

- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Dapat diidentifikasi;
- g. Dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan
- h. Mempunyai potensi manfaat ekonomi dan/atau sosial masa depan lebih dari dua belas bulan

Terhadap aset tidak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tidak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi kedalam *Aset Lain-lain*. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Di samping itu, piutang macet Perangkat Daerah yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional; perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah; kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya dan Kewajiban dengan pemberi jasa lainnya; kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek yaitu kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Pendapatan Diterima Dimuka, dan Utang Belanja.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai *Kewajiban Jangka Panjang* jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kewajiban pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas diakui pada saat terjadi kenaikan atau penurunan hak pemerintah atas kekayaan pemerintah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/(defisit)-LO, SiLPA/SiKPA, serta penutupan saldo Perubahan SAL. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

4.5 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP ENTITAS AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi yang diterapkan atas pos-pos Laporan Keuanganseluruhnya sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.951.609.670,00 . Realisasi Belanja ini berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 ,Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 .

Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.642.948.991,00 , terdiri dari:

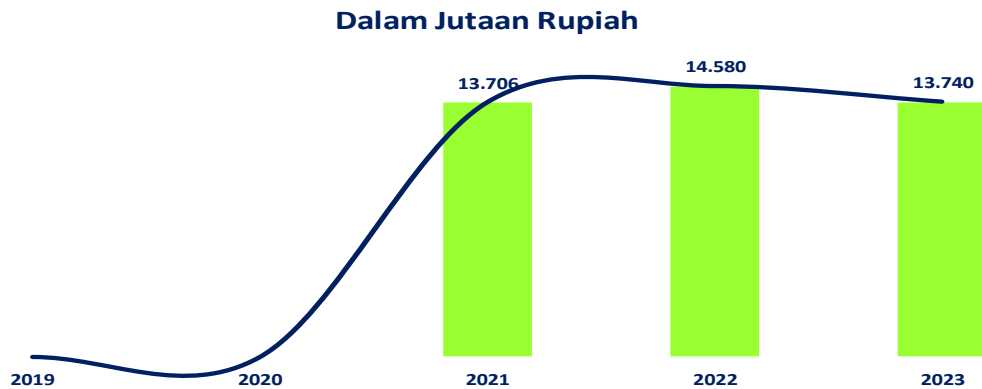
- 1) Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91 dari yang dianggarkan sebesar Rp9.629.069.298,00 ;
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp4.889.717.775,00 atau persen 97,52 dari yang dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 ;

Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp308.660.679,00 , terdiri dari:

- 1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 atau 94,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp304.123.179,00 ;
- 2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.537.500,00 ;

Trend realisasi Belanja selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Trend Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2019 s.d 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 menurun dibandingkan Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan realisasi Pendapatan-LRA sebesar dan realisasi Belanja sebesar Rp13.739.631.900,00 maka terjadi Surplus/(Defisit)-LRA sebesar Rp -13.739.631.900,00.

5.1.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.2.1 Belanja

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.951.609.670,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen pagu disebabkan beberapa hal diantaranya yang paling signifikan yaitu:

1. Sisa Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.067.994.833,00 dikarenakan ada Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.
2. Sisa Rp. 124.161.918,00 pada Belanja Barang & Jasa hasil Negosiasi dengan Penyedia .
3. Sisa Rp. 15.283.519,00 pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin hasil Negosiasi dengan Penyedia .
4. Sisa Rp. 4.537.500,00 pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi .

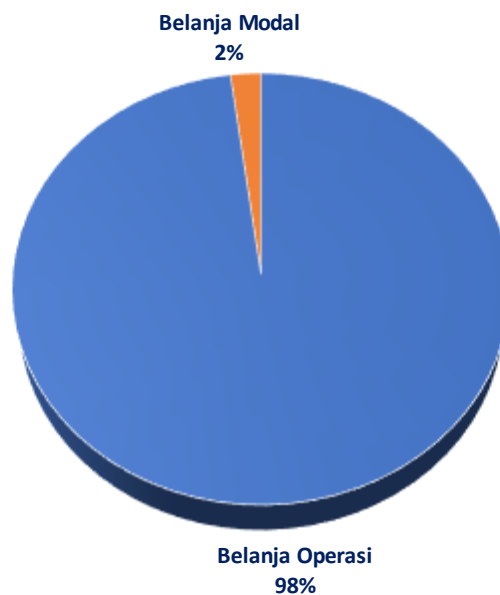
Realisasi Belanja sebesar Rp13.739.631.900,00 berasal dari Belanja Operasi sebesar Rp13.450.792.240,00 , Belanja Modal sebesar Rp288.839.660,00 . Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.579.956.076,00 , berarti realisasi Belanja menurun sebesar Rp -840.324.176,00 atau -5,76 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi penyerapan Belanja pada Tahun Anggaran 2023 menurun dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022, disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Menurunnya pagu anggaran dibandingkan tahun sebelumnya...
2. Berkurangnya jumlah ASN pensiun dibanding tahun sebelumnya...

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja
Tahun Anggaran 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja berasal dari Belanja Operasi yaitu sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari Total Belanja.

5.1.2.1.1 Belanja Operasi

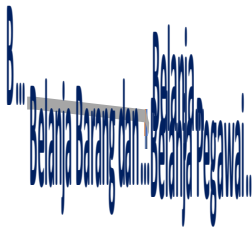
Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp13.450.792.240,00 atau 91,86 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp14.642.948.991,00 . Realisasi Belanja Operasi ini berasal dari Belanja Pegawai sebesar Rp8.561.074.465,00 , Belanja Barang dan jasa

sebesar Rp4.889.717.775,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.148.701.251,00 , berarti realisasi Belanja Operasi menurun sebesar Rp -697.909.011,00 atau -4,93 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Berikut ini disajikan grafik komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023.

Grafik Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Tahun Anggaran 2023



Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi terbesar dari Belanja Operasi berasal dari Belanja Pegawai yaitu sebesar Rp8.561.074.465,00 88,91 persen dari Total Belanja Operasi.

5.1.2.1.1.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.561.074.465,00 atau 88,91 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp9.629.069.298,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Rincian realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.888.698.438	2.443.114.157	84,57
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.025.811.720	1.781.780.600	87,95
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	217.180.320	159.570.606	73,47
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	110.900.000	83.370.000	75,18
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	30.000.000	12.310.000	41,03
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	94.040.000	74.135.000	78,83
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	131.755.400	104.864.160	79,59
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	4.553.598	1.909.261	41,93
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	57.400	29.325	51,09
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	253.400.000	210.563.432	83,10
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	5.600.000	3.645.441	65,10
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	15.400.000	10.936.332	71,02
5.1.01.01.13	Belanja Jaminan Hari Tua ASN			
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	6.444.633.953	5.823.218.576	90,36
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	6.376.153.953	5.774.738.576	90,57
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	68.480.000	48.480.000	70,79
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	295.736.907	294.741.732	99,66
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	295.736.907	294.741.732	99,66
	Jumlah	9.629.069.298	8.561.074.465	88,91

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.112.666.305,00, berarti realisasi Belanja Pegawai menurun sebesar Rp -551.591.840,00 atau -6,05 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja pegawai pada tahun 2023 menurun sebesar -6,05 persen disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Terdapat Jabatan Struktural dan JFT yang belum terisi sampai saat ini, termasuk staff yang pensiun sehingga Gaji TPP tidak terserap seluruhnya.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = ((3-4)/4) x 100%
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.114.157	2.659.252.085	-8,13
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	1.781.780.600	1.919.673.500	-7,18

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	159.570.606	185.458.245	-13,96
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	83.370.000	127.550.000	-34,64
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	12.310.000	0	0,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	74.135.000	78.035.000	-5,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	104.864.160	112.902.780	-7,12
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1.909.261	3.424.288	-44,24
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	29.325	29.889	-1,89
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	210.563.432	216.573.612	-2,78
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	3.645.441	3.901.190	-6,56
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	10.936.332	11.703.581	-6,56
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.823.218.576	6.320.814.431	-7,87
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	5.774.738.576	6.223.094.431	-7,20
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	48.480.000	97.720.000	-50,39
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.741.732	132.599.789	122,28
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	294.741.732	132.599.789	122,28
	Jumlah	8.561.074.465	9.112.666.305	-6,05

5.1.1.1.1 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.889.717.775,00 atau 97,52 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp5.013.879.693,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat sisa anggaran hasil negosiasi dengan penyedia.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.01	Belanja Barang	520.980.691	481.560.612	92,43
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	520.980.691	481.560.612	92,43
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.820.343.100	1.780.480.567	97,81
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.728.034.300	1.702.470.387	98,52
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.788.800	50.527.680	80,47

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	8.720.000	6.682.500	76,63
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.800.000	20.800.000	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	238.230.000	232.953.478	97,79
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	210.430.000	207.234.288	98,48
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	27.800.000	25.719.190	92,52
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.434.325.902	2.394.723.118	98,37
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.434.325.902	2.394.723.118	98,37
	Jumlah	5.013.879.693	4.889.717.775	97,52

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.036.034.946,00 , berarti realisasi Belanja Barang dan jasa menurun sebesar (Rp146.317.171,00) atau -2,91 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2023 tidak mengalami perubahan disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Pagu anggaran tahun 2022 dan 2021 hampir sama atau mendekati. Sehingga belanja disesuaikan dengan pagu yang ada

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.01	Belanja Barang	481.560.612	553.432.826	-12,99
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	481.560.612	553.432.826	-12,99
5.1.02.02	Belanja Jasa	1.780.480.567	1.608.613.240	10,68
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	1.702.470.387	1.511.915.524	12,60
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.527.680	96.697.716	-47,75
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.682.500	0	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.800.000	0	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	232.953.478	527.723.172	-55,86
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.234.288	391.534.375	-47,07

Kode Rekening	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	136.188.797	-100,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.719.190	0	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.394.723.118	2.346.265.708	2,07
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.394.723.118	2.346.265.708	2,07
Jumlah		4.889.717.775	5.036.034.946	-2,91

5.1.1.1.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 atau 93,58 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp308.660.679,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat hasil Negosiasi dengan Penyedia
2. Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi

Realisasi Belanja Modal ini berasal dari Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 .

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp431.254.825,00 , berarti realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2022 menurun sebesar Rp -142.415.165,00 atau -33,02 persen.

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 menurun disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu:

1. Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagian sudah terpenuhi sebagian pada tahun anggaran sebelumnya.

Laporan Keuangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 – Audited

Laporan Realisasi Anggaran		JUMLAH		
4.1	Pendapatan Asli Daerah - LRA	-		
4.1.01	Pendapatan Pajak - LRA	-	TRUE	
4.1.02	Pendapatan Retribusi - LRA	-	TRUE	
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	-	TRUE	
4.1.04	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LRA	-	TRUE	
4.2	Pendapatan Transfer	-		
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	TRUE	
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-	TRUE	
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-		
4.3.01	Pendapatan Hibah	-	TRUE	
4.3.02	Dana Darurat	-	TRUE	
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Peru	-	TRUE	
	Jumlah Pendapatan LRA	-	TRUE	
5.1	Belanja Operasi	13.450.792.240,00	TRUE	
5.1.01	Belanja Pegawai	8.561.074.465,00	TRUE	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.889.717.775,00	TRUE	
5.1.03	Belanja Bunga	-	TRUE	
5.1.04	Belanja Subsidi	-	TRUE	
5.1.05	Belanja Hibah	-	TRUE	
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	TRUE	
5.2	Belanja Modal	288.839.660,00	TRUE	
5.2.01	Belanja Modal - Tanah	-	TRUE	
5.2.02	Belanja Modal - Peralatan dan Mesin	288.839.660,00	TRUE	
5.2.03	Belanja Modal - Gedung dan Bangunan	-	TRUE	
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	TRUE	
5.2.05	Belanja Modal - Aset Tetap Lainnya	-	TRUE	
	Belanja Modal Aset Lainnya	-		
5.3	Belanja Tidak Terduga	-	TRUE	
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	-	TRUE	
5.4	Belanja Transfer	-	TRUE	
5.4.01	Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	-	TRUE	
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan	-	TRUE	
	JUMLAH BELANJA Daerah	13.739.631.900,00	TRUE	
	Surplus / Defisit LRA	(13.739.631.900,00)	TRUE	
Laporan Operasional		JUMLAH		
	Pendapatan Asli Daerah - LO			
7.1.01	Pendapatan Pajak - LO	-	TRUE	
7.1.02	Pendapatan Retribusi - LO	-	TRUE	
7.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisah	-	TRUE	
7.1.04	Pendapatan Lain-lain PAD yang sah - LO	-	TRUE	
	JUMLAH PAD	-	TRUE	
7.2.01.01.0	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	-	TRUE	
Dana Bagi	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	-	TRUE	
7.2.01.01.0	Dana Alokasi Umum - LO	-	TRUE	
7.2.01.01.0	Dana Alokasi Khusus - LO	-	TRUE	
	Dana Penyesuaian - LO	-	TRUE	
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	-	TRUE	
	Bantuan Keuangan	-		
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	-		
	Pendapatan Transfer	-		
	Lain -Lain Pendapatan Yang Sah - LO			
7.3.01.02	Pendapatan Hibah - LO	-	TRUE	
Pendapat	Pendapatan Lainnya	-	TRUE	
	JUMLAH LAIN-LAIN Pend Yang Sah	-	TRUE	
	JUMLAH PENDAPATAN - LO	-	TRUE	
	Beban			
8.1.01	Beban Pegawai	8.561.074.465,00	TRUE	
8.1.02.01	Beban Persediaan	473.132.707,00	TRUE	
8.1.02.02	Beban Jasa	1.782.894.069,00	TRUE	utang belanja listrik tdk update
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan	232.953.478,00	TRUE	
8.1.02.04	Beban Perjalanan Dinas	2.394.723.118,00	TRUE	
8.1.03	Beban Bunga	-	TRUE	
8.1.04	Beban Subsidi	-	TRUE	
8.1.05	Beban Hibah	-	TRUE	
8.1.06	Beban Bantuan Sosial	-	TRUE	
8.1.07	Beban Penyusutan dan Amortisasi	489.854.029,00	TRUE	
8.1.08	Beban Penyisihan Piutang	-	TRUE	
8.2	Beban Transfer	-	TRUE	
Beban Lai	Beban Lain-lain	-	TRUE	
Beban Lua	Beban Luar Biasa	-	TRUE	
	JUMLAH BEBAN	13.934.631.866,00	TRUE	
	SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(13.934.631.866,00)	TRUE	
	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional			
Surplus Ke	Surplus Kegiatan non Operasional Lainnya	-		
Defisit Ke	Defisit Kegiatan non Operasional Lainnya	-		
Surplus De	Surplus Defisit LO	-		
	SURPLUS /DEFISIT DARI KEG. NON OPERASIONAL	-		
	Pos Luar Biasa			
	Pendapatan Luar Biasa	-		
	Beban Luar Biasa	-		

5.1.2.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp288.839.660,00 atau 94,97 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp304.123.179,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Terdapat hasil Negosiasi dengan Penyedia.

Rincian realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	51.000.506	49.528.200	97,11
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	51.000.506	49.528.200	97,11
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	26.936.629	24.670.760	91,59
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	15.175.000	13.670.760	90,09
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.761.629	11.000.000	93,52
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	226.186.044	214.640.700	94,90
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	163.564.800	152.292.000	93,11
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.621.244	62.348.700	99,56
Jumlah		304.123.179	288.839.660	94,97

Apabila dibandingkan dengan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp431.254.825,00 , berarti realisasi Belanja Peralatan dan Mesin menurun sebesar Rp -142.415.165,00 atau -33,02 persen dibanding Tahun Anggaran 2022. Hal ini disebabkan oleh :

1. Belanja Modal Personal Computer, Belanja Modal Komputer Unit Lainnya, Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebagian sudah terpenuhi pada tahun anggaran sebelumnya.

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2022, dapat dilihat pada rincian pada tabel di bawah ini (dalam rupiah):

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	0	7.200.000	-100,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	0	7.200.000	-100,00

No	Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)	%
1	2	3	4	5= ((3-4)/4) x100%
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	49.528.200	16.576.740	198,78
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	49.528.200	16.576.740	198,78
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	24.670.760	173.445.542	-85,78
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	13.670.760	173.445.542	-92,12
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	11.000.000	0	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	214.640.700	224.032.543	-4,19
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	152.292.000	199.392.543	-23,62
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	62.348.700	24.640.000	153,04
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	10.000.000	-100,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0	10.000.000	-100,00
Jumlah		288.839.660	431.254.825	-33,02

5.1.2.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen dari yang dianggarkan sebesar Rp4.537.500,00 .

Penyerapan anggaran tersebut belum mencapai 100 persen, disebabkan antara lain :

1. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tidak terrealisasi.

Rincian realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Kode Rekening	Uraian	Anggaran setelah Perubahan Tahun Anggaran 2023	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	%
1	2	3	4	5 = 4/3 x 100%
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	4.537.500	0	0,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	4.537.500	0	0,00
Jumlah		4.537.500	0	0,00

5.1.2.2.2.5 Surplus/(Defisi) – LRA

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LRA dan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) - LRA Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp -13.739.631.900,00, dengan perhitungan sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan – LRA	0,00	0,00
Belanja - LRA	13.739.631.900,00	14.579.956.076,00
Surplus/ (Defisit) – LRA	-13.739.631.900,00	-14.579.956.076,00

5.1.2.5 Perhitungan Anggaran

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp - 13.739.631.900,00. Perhitungan Anggaran diperoleh dari selisih antara anggaran dengan realisasinya. Jumlah keseluruhan selisih merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Rincian realisasi Perhitungan Anggaran adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Kekurangan Pendapatan/Pelampauan – LRA	0,00	0,00
Penghematan Belanja	-1.211.977.770,00	-944.661.365,0
Pelampauan Penerimaan Pembiayaan	0,00	0,00
Penghematan Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	-13.739.631.900,00	-14.579.956.076,00

5.1.2.6 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp - 13.739.631.900,00. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran diperoleh dari selisih realisasi Pendapatan – LRA, Belanja, dan Pembiayaan Netto tahun berkenaan. Jumlah keseluruhan selisih realisasi merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan Defisit–LRA sebesar Rp -13.739.631.900,00, Realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp0,00 , maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp - 13.739.631.900,00, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Realisasi Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Realisasi Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan – LRA	0,00	0,00
Belanja - LRA	13.739.631.900,00	14.579.956.076,00
Surplus / (Defisit) – LRA	-13.739.631.900,00	-14.579.956.076,00
Pembiayaan Netto	0,00	0,00
SILPA	-13.739.631.900,00	-14.579.956.076,00

Dengan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp - 14.579.956.076,00 .

CATATAN PENTING LAINNYA-

5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

5.2.1 PENJELASAN UMUM NERACA

Ringkasan Komposisi Neraca per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Aset Lancar	12.849.600,00	5.381.695,00
Aset Tetap	6.496.886.576,00	6.812.497.871,00
Aset Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Aset	6.509.736.176,00	6.817.879.566,00
Kewajiban Jangka Pendek	8.077.781,00	5.664.279,00
Jumlah Kewajiban	8.077.781,00	5.664.279,00
Ekuitas	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00
Jumlah Ekuitas	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	6.509.736.176,00	6.817.879.566,00

Jumlah Aset per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.509.736.176,00 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp12.849.600,00 , Aset Tetap sebesar Rp6.496.886.576,00 dan Aset Lainnya sebesar Rp0,00 .

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 .

5.2.2 PENJELASAN PER POS NERACA

5.2.2.1 Aset Lancar

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau berupa kas dan setara kas. Jumlah Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 . Hal ini berarti asset lancer meningkat sebesar Rp7.467.905,00 atau 138,76 persen.

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00

Jenis Aset Lancar	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00
Bagian Lancar Piutang Sewa	0,00	0,00
Piutang Lain-lain	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Penyisihan Piutang BLUD	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	12.849.600,00	5.381.695,00
Persediaan BLUD	0,00	0,00
Jumlah	12.849.600,00	5.381.695,00

5.2.2.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP)/ uang kegiatan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Jasa Giro yang belum disetorkan kembali ke Kas Daerah atau Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara/Daerah atau Kewajiban yang belum dibayarkan per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 .

Kas di Bendahara Pengeluaran terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Kas Uang Tunai	0	0
Kas di Bank	0	0
Lain-lain	0	0
Jumlah	0	0

5.2.2.1.3 Persediaan

Persediaan merupakan pos untuk mencatat aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual kembali dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp12.849.600,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.381.695,00 . Hal ini berarti persediaan meningkat sebesar Rp7.467.905,00 atau 138,76 persen.

Rincian Persediaan terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Barang/perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah	12.849.600	5.381.695
Bahan/perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi	0	
Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	
Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah	0	
Jumlah	12.849.600	5.381.695

Rincian Persediaan berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

NO	JENIS PERSEDIAAN	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
	BARANG PAKAI HABIS	12.849.600	5.381.695
	BAHAN	1.614.100	1.920.000
1	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.614.100	1.920.000
	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	11.235.500	3.461.695
1	Alat Tulis Kantor	1.017.000	0
8	Alat Listrik	10.050.000	3.461.695
13	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	168.500	0
	JUMLAH PERSEDIAAN	12.849.600	5.381.695

Rekap persediaan menurut jenisnya yaitu sebagai berikut:

No	Jenis Persediaan	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
1.	Barang Pakai Habis	12.849.600	5.381.695
	- Bahan	1.614.100	1.920.000
	- Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	11.235.500	3.461.695
	Jumlah	12.849.600	5.381.695

5.2.2.2 Aset Tetap

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.496.886.576,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.812.497.871,00 . Hal ini berarti Aset Tetap menurun sebesar -Rp315.611.295,00 atau -4,63 persen.

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.496.886.576,00 dan Rp6.812.497.871,00 . Rincian Aset Tetap terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Tanah	5.138.640.000,00	5.138.640.000,00
Peralatan dan Mesin	7.973.956.834,00	7.685.117.174,00
Gedung dan Bangunan	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	67.202.000,00	67.202.000,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-12.037.203.796,00	-11.432.752.841,00
Jumlah	6.496.886.576,00	6.812.497.871,00

5.2.2.2.1 Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.138.640.000,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.138.640.000,00 . Hal ini berarti jumlah aset tetap Tanah tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

5.2.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.973.956.834,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.685.117.174,00 . Hal ini berarti jumlah aset tetap Peralatan dan Mesin meningkat sebesar Rp288.839.660,00 atau 3,76 persen.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Alat Besar	112.689.000	112.689.000			112.689.000
1.1	Alat Besar Darat					
1.2	Alat Bantu	112.689.000	112.689.000			112.689.000
2	Alat Angkutan	2.309.552.285	2.309.552.285			2.309.552.285
2.1	Alat Angkutan Darat Bermotor	2.309.552.285	2.309.552.285			2.309.552.285
2.2	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor					
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur					
3.1	Alat Bengkel Bermesin					
3.2	Alat Bengkel Tak Bermesin					
3.3	Alat Ukur					
4	Alat Pertanian					
4.1	Alat Pengolahan					

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kura ng	
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.862.957.821	2.862.957.821	49.528.200		2.912.486.021
5.1	Alat Kantor.	1.194.976.630	1.194.976.630			1.194.976.630
5.2	Alat Rumah Tangga	1.288.256.281	1.288.256.281	49.528.200		1.337.784.481
5.3	Meubelair	379.724.910	379.724.910			379.724.910
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	331.046.772	331.046.772	24.670.760		355.717.532
6.1	Alat Studio.	116.854.500	116.854.500	13.670.760		130.525.260
6.2	Alat Komunikasi	95.392.272	95.392.272	11.000.000		106.392.272
6.3	Peralatan Pemancar	118.800.000	118.800.000			118.800.000
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan					
7.1	Alat Kedokteran.					
7.2	Alat Kesehatan Umum					
8	Alat Per-senjataan					
8.1	Persenjataan Non Senjata Api					
9	Komputer	2.046.871.296	2.046.871.296	214.640.700		2.261.511.996
9.2	Komputer Unit	1.035.837.588	1.035.837.588	152.292.000		1.188.129.588
9.2	Peralatan Komputer	1.011.033.708	1.011.033.708	62.348.700		1.073.382.408
10	Rambu - Rambu					
10.1	Rambu – Rambu Lalu Lintas Darat					
11	Peralatan Olah Raga	22.000.000	22.000.000			22.000.000
11.1	Peralatan Olah Raga.					
Jumlah		7.685.117.174,00	7.685.117.174,00	288.839.660,00		7.973.956.834,00

Mutasi/perubahan Peralatan dan Mesin tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	7.685.117.174,00
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin (*)	288.839.660,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	

Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	288.839.660,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Des 2023	7.973.956.834,00

(*) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp288.839.660,00 berasal dari:

- 1) Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun 2023 Anggaran adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.02	BM Peralatan dan Mesin	288.839.660,00
Jumlah Belanja		288.839.660,00

- 2) Ditambah Realisasi Belanja Modal selain Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Peralatan dan Mesin, yaitu berasal dari (dalam rupiah):

Koding	Uraian	31 Desember 2023
5.2.01	BM Tanah	
5.2.03	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.04	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	
5.2.05	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.06	BM Aset Lainnya	
Jumlah Belanja		

- 3) Dikurangi Realisasi Belanja Modal PM pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 4) Dikurangi Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada LRA Tahun Anggaran 2023 yang menjadi BM Jenis Aset Tetap Yang Lain, yaitu menjadi (dalam rupiah)

Koding	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Tanah	
5.2.3	BM Gedung dan Bangunan	
5.2.3	BM Jalan, Irigasi dan Jaringan	

Kodering	Uraian	31 Desember 2021
5.2.3	BM Aset Tetap Lainnya	
5.2.3	BM Aset Lainnya	
5.2.3	Persediaan	
5.2.3	Aset Tak Berwujud	
Jumlah Belanja		

- 5) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang menjadi persediaan sebesar Rp0,00 .
- 6) Dikurangi Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp0,00 .

Penambahan Peralatan dan Mesin tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar Rp0,00 dan terdapatnya penambahan Peralatan dan Mesin yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal. Penambahan yang tidak dipengaruhi oleh belanja modal merupakan penambahan melalui transaksi mutase/hibah masuk dari kementerian.

5.2.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.354.291.538,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.354.291.538,00 . Hal ini berarti Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan sebesar Rp0,00 atau 0,00 persen.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Gedung Kantor	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00
	Jumlah	5.354.291.538,00	5.354.291.538,00	0,00	0,00	5.354.291.538,00

Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan tersebut adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Saldo Awal	
Penambahan:	
Realisasi Belanja Modal Yang Menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan (*)	5.354.291.538,00
Penerimaan dari OPD lain (Mutasi masuk antar OPD)	
Pengembangan (Kapitalisasi)	
Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi dari Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Masuk)	
Reklasifikasi dari Jenis Persediaan (Reklasifikasi Masuk)	
Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya Yang Sah	
Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Penambahan	0,00
Pengurangan:	
Penghapusan	
Penyerahan Aset Tetap ke OPD Lain (Mutasi Keluar Antar OPD)	

Koreksi Pencatatan	
Reklasifikasi ke Persediaan, Jenis Aset Tetap Yang Lain, Akun Lainnya (Reklasifikasi Keluar)	
Reklasifikasi ke Persediaan (Reklasifikasi Keluar)	
Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya Yang Sah	
Hibah/Mutasi Keluar Aset Tetap dari BTT	
Jumlah Pengurangan	0,00
Jumlah Per 31 Des 2023	5.354.291.538,00

5.2.2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp67.202.000,00 , sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.202.000,00 .

Hal ini berarti nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tidak mengalami perubahan sebesar 0,00 persen dibandingkan tahun 2022.

Rincian mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Jenis	Saldo Akhir 2022	Saldo Awal 2023	Mutasi		Saldo Akhir 2023
				Tambah	Kurang	
1	Jalan, Irigasi dan Jaringan	67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00
Jumlah		67.202.000,00	67.202.000,00	0,00	0,00	67.202.000,00

5.2.2.2.5 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan merupakan jumlah total akumulasi penyusutan dari Aset Tetap, yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi, dan Jaringan; dan Aset Tetap Lainnya. Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.037.203.796,00) sedangkan Per 31 Desember 2022 sebesar (Rp11.432.752.841,00). Hal ini Akumulasi Penyusutan berarti menurun sebesar - Rp604.450.955,00 atau 5,29 persen.

Nilai Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 sebesar (Rp12.037.203.796,00) dari Total Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp6.496.886.576,00 .

Berikut rincian Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2023 (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	6.996.319.905	6.449.282.290

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.006.165.851	4.952.112.643
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	34.718.040	31.357.908
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Jumlah	12.037.203.796	11.432.752.841

5.2.2.3 Kewajiban

Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti meningkat sebesar Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen. Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

5.2.2.4.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 ,sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti kewajiban jangka pendek meningkat sebesar Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	31 Desember 2023 (Audited)	31 Desember 2022 (Audited)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	8.077.781,00	5.664.279,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	8.077.781,00	5.664.279,00

5.2.2.4.2 Utang Belanja

Jumlah Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.664.279,00 . Hal ini berarti utang belanja meningkat sebesar Rp2.413.502,00 atau 42,61 persen.

Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.077.781,00 tersebut merupakan belanja listrik.

5.2.2.5 Ekuitas

Ekuitas merupakan akun untuk menampung selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.812.215.287,00 . Hal ini berarti ekuitas menurun sebesar -Rp310.556.892,00 atau -4,56 persen.

5.2.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.3 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1 PENJELASAN UMUM LAPORAN OPERASIONAL

Ringkasan Laporan Operasional Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Pendapatan-LO		
Beban	14.066.125.540,00	14.681.778.472,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp14.066.125.540,00 terdiri dari Beban Pegawai sebesar Rp8.558.653.033,00, Beban Persediaan sebesar Rp473.132.707,00, Beban Jasa sebesar Rp1.782.894.069,00, Beban Pemeliharaan sebesar Rp232.953.478,00, Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp2.394.723.118,00, Beban Hibah sebesar Rp0,00, Beban Bantuan Sosial sebesar Rp0,00, Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp623.769.135,00, Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) diperoleh dari Pendapatan-LO sebesar dikurangi dengan Beban sebesar Rp14.066.125.540,00 ditambah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp0,00.

5.3.2 PENJELASAN PER POS LAPORAN OPERASIONAL

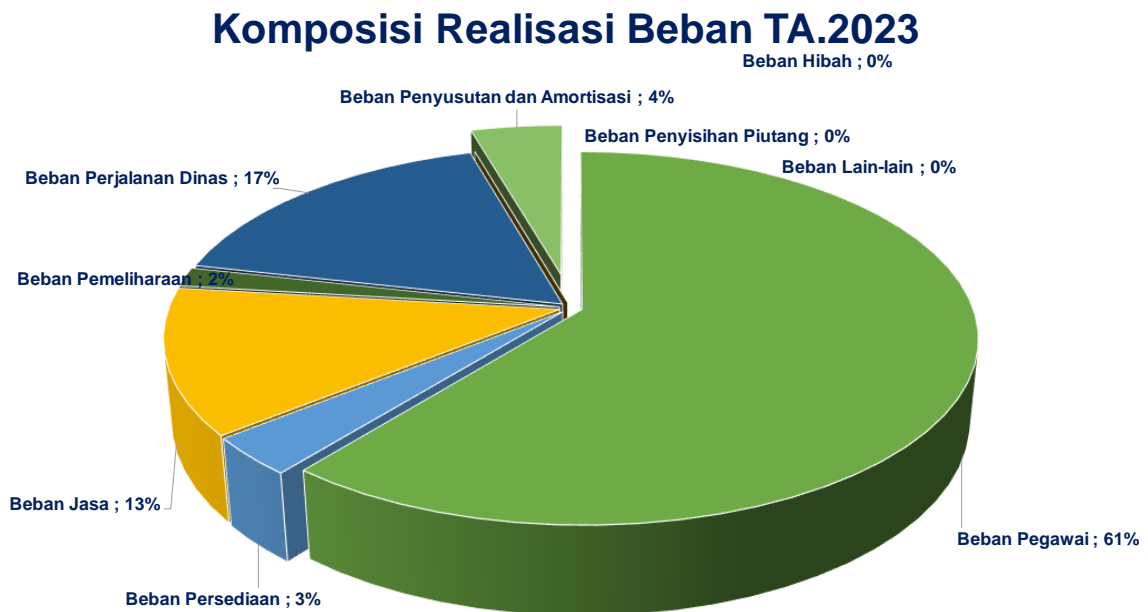
5.3.2.1 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp14.066.125.540,00 terdiri dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pegawai	8.558.653.033,00	9.112.666.305,00

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Persediaan	473.132.707,00	550.229.311,00
Beban Jasa	1.782.894.069,00	1.609.843.735,00
Beban Pemeliharaan	232.953.478,00	412.727.172,00
Beban Perjalanan Dinas	2.394.723.118,00	2.346.265.708,00
Beban Dana Bagi Hasil Pajak	0,00	0,00
Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	623.769.135,00	638.480.041,00
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Transfer	0,00	0,00
Beban Lain-lain	0,00	11.566.200,00
Jumlah	14.066.125.540,00	14.681.778.472,00

Berikut ini disajikan komposisi realisasi masing-masing jenis Beban terhadap realisasi total Beban:



5.3.2.1.1 Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp8.558.653.033,00 apabila dibandingkan dengan Realisasi Beban pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp9.112.666.305,00 , maka realisasi beban pegawai menurun sebesar (Rp554.013.272,00) atau -6,08 persen.

Rincian Objek Beban Pegawai adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Gaji dan Tunjangan	2.440.692.725	2.659.252.085
Beban Tambahan Penghasilan PNS	5.823.218.576	6.320.814.431
ambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	294.741.732	132.599.789
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	-	-
Gaji dan Tunjangan Gubernur/Wakil Gubernur	-	-
Belanja Pegawai BLUD	-	-
Jumlah	8.558.653.033,00	9.112.666.305,00

5.3.2.1.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp473.132.707,00 , Apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Persediaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp550.229.311,00 , berarti realisasi Beban Persediaan sebesar menurun sebesar (Rp77.096.604,00) atau -14,01 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Persediaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Barang Pakai Habis	473.132.707	550.229.311
Beban Barang Tak Habis Pakai	0	0
Beban Barang Bekas Dipakai		
Beban Uang/Barang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		
Jumlah		

5.3.2.1.3 Beban Jasa

Realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp1.782.894.069,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.609.843.735,00 , berarti realisasi Beban Jasa meningkat sebesar Rp173.050.334,00 atau 10,75 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Jasa adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Jasa Kantor	1.704.883.889	1.513.146.019
Beban Premi Asuransi	50.527.680	96.697.716

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Sewa Tanah		
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	6.682.500	
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.800.000	
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah		
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah		
Jumlah	1.782.894.069,00	1.609.843.735,00

5.3.2.1.4 Beban Pemeliharaan

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp232.953.478,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp412.727.172,00 , berarti realisasi Beban Pemeliharaan menurun sebesar (Rp179.773.694,00) atau -43,56 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Objek Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Pemeliharaan Tanah	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	207.234.288	391.534.375
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	21.192.797
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.719.190	-
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Modal yang Tidak Dikapitalisasi yang merupakan Pemeliharaan	-	-
Jumlah	232.953.478,00	412.727.172,00

5.3.2.1.5 Beban Perjalanan Dinas

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp2.394.723.118,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.346.265.708,00 , berarti realisasi Beban Perjalanan Dinas meningkat sebesar Rp48.457.410,00 atau 2,07 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian realisasi Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.394.723.118	2.346.265.708
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	-	-
Jumlah	2.394.723.118,00	2.394.723.118,00

5.3.2.1.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp623.769.135,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp638.480.041,00 , berarti realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi menurun sebesar (Rp14.710.906,00) atau -2,30persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

No	Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
I	Beban Penyusutan		
1.	Peralatan dan Mesin	566.355.795	581.066.701
2.	Gedung dan Bangunan	54.053.208	54.053.208
3.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.360.132	3.360.132
4.	Aset Tetap Lainnya	0	0
5.	Aset Lain-Lain	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan	623.769.135	638.480.041
II	Beban Amortisasi		
	Aset Tidak Berwujud	0	0
	Jumlah Beban Amortisasi	0	0
	Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	623.769.135	638.480.041

5.3.2.1.7 Beban Lain-lain

Realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp0,00 , apabila dibandingkan dengan realisasi Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp11.566.200,00 , berarti realisasi Beban Lain-lain menurun sebesar (Rp11.566.200,00) atau -100,00 persen.

Rincian Objek Beban Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Aset Tetap Ekstrakomptabel	-	-
Nilai Buku Aset Tetap Yang Dihapuskan	-	-
Belanja Tidak Terduga	-	-
Jumlah	,00	11.566.200,00

5.3.2.2 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional

Berdasarkan realisasi Pendapatan-LO dan realisasi Beban Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar (Rp14.066.125.540,00) dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 2023 (Audited)
Pendapatan-LO		
Beban	14.681.778.472,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.681.778.472,00	-14.066.125.540,00

5.3.2.3 Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa adalah penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional. Dari realisasi Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00) dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 , maka realisasi Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 yaitu sebesar (Rp14.066.125.540,00).

5.3.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa merupakan akun untuk menyajikan pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan rutin atau sering terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Untuk Tahun Anggaran 2023 tidak terdapat realisasi untuk Pos Luar Biasa.

5.3.2.5 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO adalah penjumlahan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional, Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa. Realisasi

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar (Rp14.066.125.540,00), berasal dari (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2022 (Audited)	Tahun Anggaran 3 (Audited)
Pendapatan-LO		
Beban	14.681.778.472,00	14.066.125.540,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional	-14.681.778.472,00	-14.066.125.540,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/(Defisit)-LO	-14.681.778.472,00	-14.066.125.540,00

5.3.3 CATATAN PENTING LAINNYA

-

5.4.1 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.2 PENJELASAN UMUM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

- a) Ekuitas Awal;
- b) Surplus/Defisit-LO pada Periode bersangkutan;
- c) Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan
- d) Koreksi kesalahan mendasar, seperti:
 - (1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
 - (2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
- e) Ekuitas Akhir

Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut (disajikan dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Ekuitas Awal	6.812.215.287,00	7.279.622.492,45
Surplus/(Defisit)-LO	-14.066.125.540,00	-14.681.778.472,00
RK PPKD	13.739.631.900,00	14.579.956.076,00
RA PPKD (Nilai Perolehan)	0,00	0,00
RA PPKD (Akumulasi Penyusutan)	0,00	0,00
Ekuitas	15.936.748,00	-365.584.809,45
Ekuitas Akhir	6.501.658.395,00	6.812.215.287,00

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 terdiri dari:

1. Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 .
2. Surplus/Defisit-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp-14.066.125.540,00.
3. RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 .
4. RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 .

5. RA PPKD (Akumulasi Penyusutan) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00 .
6. Ekuitas Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15.936.748,00 .
7. Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 .

5.4.3 PENJELASAN PER POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.4.3.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 . Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir dari Ekuitas Tahun Anggaran 2022 Audited.

Apabila dibandingkan dengan realisasi Ekuitas Awal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.279.622.492,45 , berarti realisasi Ekuitas Awal menurun sebesar Rp-467.407.205,45 atau -6,42persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.2 Surplus/(Defisit)-LO

Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp-14.066.125.540,00. Akun ini dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/(Defisit)-LO.

Surplus/Defisit-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp-14.066.125.540,00. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp-14.681.778.472,00. Hal ini berarti Apabila dibandingkan dengan Surplus/(Defisit)-LO Tahun Anggaran 2023 Surplus/(Defisit)-LO Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meningkat sebesar Rp615.652.932,00 atau -4,19 persen dibanding Tahun Anggaran 2022.

5.4.3.3 RK PPKD

RK PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi kas antar entitas (PPKD dan OPD. RK PPKD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.739.631.900,00 .

5.4.3.4 RA PPKD

RA PPKD adalah nilai yang menunjukkan transaksi aset tetap antar entitas (PPKD dan OPD). Saldo RA PPKD (Nilai Perolehan) Tahun 2023 terdiri atas penerimaan/mutasi masuk barang dan pengeluaran/mutasi keluar barang sebesar Rp0,00 serta Saldo RA PPKD

(Akumulasi Penyusutan) yang berupa nilai akumulasi penyusutan dari nilai aset tersebut sebesar Rp0,00

5.4.3.5 Ekuitas

Akun ekuitas menunjukkan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas.

Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut (dalam rupiah):

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Koreksi Saldo Awal Kas	0,00	0,00
Kas Lainnya (BLUD)	0,00	0,00
Koreksi Setoran Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu	0,00	-365.069.079,00
Koreksi Setoran Kas di BP Tahun Lalu	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	-960.000,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen	0,00	0,00
Koreksi Kemitraan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang Sewa	0,00	0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TPA	0,00	0,00
Koreksi Bagian Lancar Piutang TGR	0,00	0,00
Koreksi KDP	0,00	0,00
Koreksi Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Pencatatan Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tetap	0,00	3,36
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	19.318.180,00	-515.733,81
Koreksi Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Penyusutan Aset Lain-Lain	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban	0,00	0,00
Koreksi Utang Belanja	--2.421.432,00	0,00
Koreksi Lain-Lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Koreksi Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Koreksi Beban Barang Dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Nilai Ekstrakomtabel	0,00	0,00

Uraian	Tahun Anggaran 2023 (Audited)	Tahun Anggaran 2022 (Audited)
Lain - Lain	0,00	0,00
Pembayaran Piutang Bagian Lancar TGR	0,00	0,00
Pembayaran Piutang Lain-Lain	0,00	0,00
Jumlah	15.936.748,00	-365.584.809,45

Koreksi ekuitas ini disebabkan oleh :

1. terdapat koreksi akumulasi penyusutan asset tetap pada peralatan dan mesin.
2. terdapat koreksi nilai pengakuan utang Belanja Pegawai
3. terdapat koreksi nilai persediaan

5.4.3.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.501.658.395,00 . Nilai Ekuitas ini merupakan nilai yang disajikan sebagai akun Ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

Hal ini Apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.812.215.287,00 , Ekuitas Akhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menurun sebesar Rp-310.556.892,00 atau -4,564persen dibanding Tahun Anggaran 2023.

5.4.4 CATATAN PENTING LAINNYA

-

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN BPKAD

6.1 DOMISILI

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 yang beralamat di Jalan Ciumbuleuit No. 2, Kota Bandung.

6.2 DASAR HUKUM LANDASAN OPERASIONAL

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan kegiatan operasionalnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

6.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 142 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Tugas pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, menyelenggarakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi sebagai berikut :

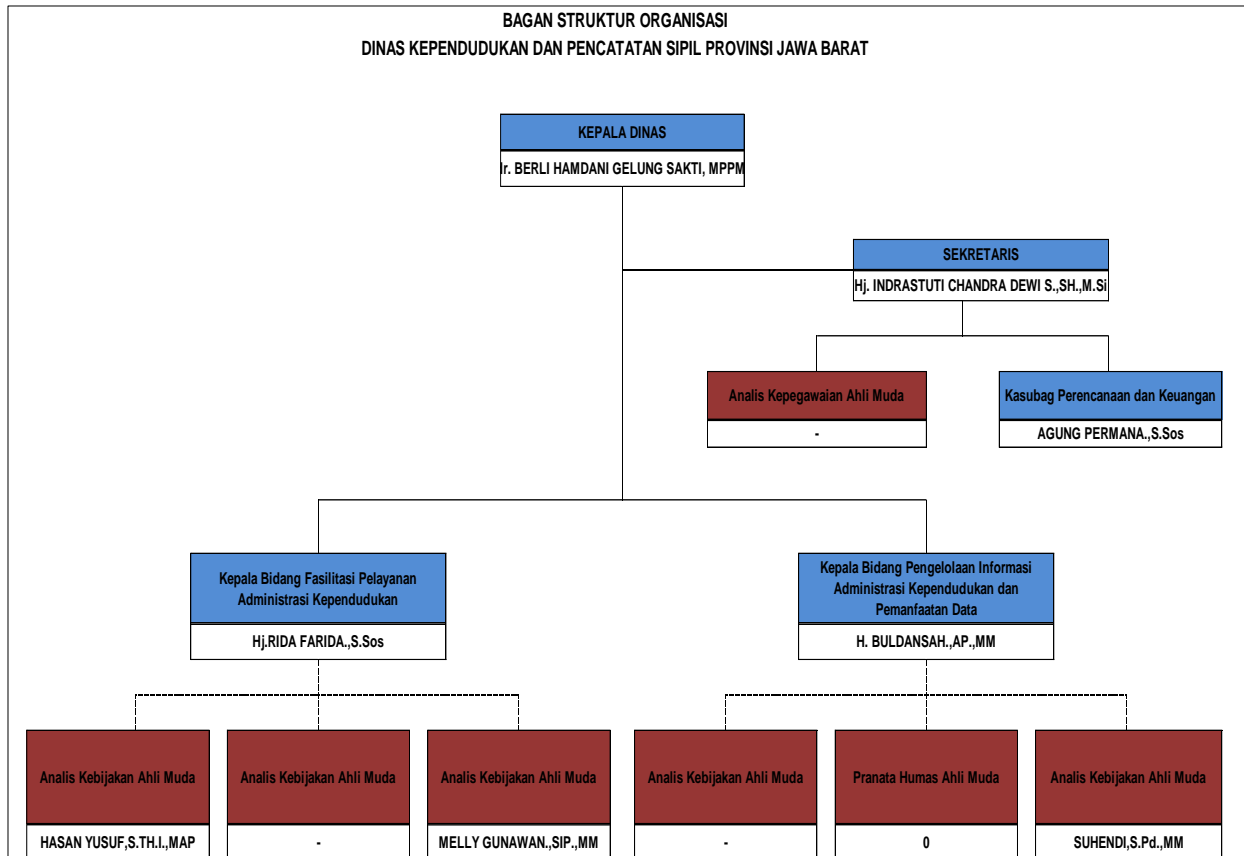
- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;

- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.4 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat



LAMPIRAN

BAB VII

PENUTUP

Dari uraian diatas dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Neraca Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 31 Desember 2023 menunjukkan jumlah Aset sebesar Rp6.509.736.176,00 Kewajiban sebesar Rp8.077.781,00 dan Ekuitas sebesar Rp6.501.658.395,00 ;
2. Realisasi APBD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 menunjukkan Pendapatan-LRA berjumlah atau persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar dan Belanja berjumlah Rp13.739.631.900,00 atau 91,89 persen dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp14.951.609.670,00 . Dengan demikian, terdapat (Defisit)-LRA antara Pendapatan-LRA dan Belanja sebesar Rp-13.739.631.900,00;
3. Pada Laporan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 terdapat Beban sebesar Rp14.066.125.540,00 dan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp0,00 sehingga (Defisit)-LO sebesar Rp-14.066.125.540,00;
4. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp6.812.215.287,00 dan Ekuitas Akhir sebesar Rp6.501.658.395,00 .

Bandung, 05 Agustus 2024

➤ Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil a

Provinsi Jawa Barat,



dr. BERLI HAMDANI GELUNG SAKTI, MPPM.
Pembina Utama Madya

NIP. 19661020 199803 1 003

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 DAFTAR SALDO PERSEDIAAN
 31 Desember 2023

NO	Kode Akun	URAIAN	SATUAN	BARANG/PERLENGKAPAN YANG			BAHAN/PERLENGKAPAN			BARANG DALAM PROSES				BARANG YANG DISIMPAN		
				Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Nilai Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Nilai Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Nilai Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah Satuan	Harga (Rp)	Nilai Persediaan Akhir (Rp)	Jumlah
1		2	3	4	5	6=4x5	7	8	9=7x8	10	11	12	13	14	15=13x14	16
	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS				12.849.600			0						0	12.849.600
	1.1.12.01.01	BAHAN				1.614.100			0						0	1.614.100
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan Dan Konstruksi				1.614.100			0						0	1.614.100
		Wastafel Komplit Kran & ACC	Buah			0										
		Kran	Buah	20,00	80.705,00	1.614.100										
	1.1.12.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR				11.235.500			0						0	11.235.500
1	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor				1.017.000			0						0	1.017.000
		Paper Tray/Rak Kertas	Buah	10,00	101.700,00	1.017.000										
		Alat Listrik				10.050.000			0						0	10.050.000
		Baterai AA 6 pcs	Buah	10	145.000,00	1.450.000										
		Stop Kontak 4 Lubang	Buah	10	75.000,00	750.000										
		Stop Kontak Lubang 6 Uticon	Buah	10	30.000,00	300.000										
		Lampu LED Spesifikasi : 20 Watt	Buah	30	105.000,00	3.150.000										
		Lampu LED Spesifikasi : 50 Watt	Buah	20	185.000,00	3.700.000										
		Lampu Senter Spesifikasi : 20 Watt	Buah	5	140.000,00	700.000										
13	1.1.12.01.03.0052	Makan dan Minum Rapat				168.500			0						0	168.500
		Air mineral galon	Buah	10	16.850,00	168.500									0	168.500
		JUMLAH PERSEDIAAN				12.849.600			0						0	12.849.600

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

AGUNG PERMANA, S.Sos.
 NIP. 19750101 200801 1 007

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR PERSEDIAAN
31 Desember 2023

NO	Kode Akun	URAIAN	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2023	SALDO PERSEDIAAN PER 31 DES 2022
1		2	3	4
	1.1.12.01	BARANG PAKAI HABIS	12.849.600	5.381.695
	1.1.12.01.01	BAHAN	1.614.100	1.920.000
1	1.1.12.01.01.0001	Bahan Bangunan Dan Konstruksi	1.614.100	1.920.000
	1.1.12.01.03	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR	11.235.500	3.461.695
1	1.1.12.01.03.0001	Alat Tulis Kantor	1.017.000	0
8	1.1.12.01.03.0008	Alat Listrik	10.050.000	3.461.695
13	1.1.12.01.03.0052	Makan dan Minum Rapat	168.500	0
JUMLAH PERSEDIAAN			12.849.600	5.381.695

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
31 Desember 2023

NO	JENIS ASET TETAP	SALDO AWAL 2023 (Rp)	MUTASI		SALDO AKHIR PER 31- Dec-2023 (Rp)	AKUMULASI PENYUSUTAN SD 31-Dec-2023 (Rp)	NILAI BUKU PER 31-Dec-2023 (Rp)
			BERTAMBAH (Rp)	BERKURANG (Rp)			
	2	3	4	5	6=(3+4-5)	7	8=(6-7)
1	TANAH	5.138.640.000	-	-	5.138.640.000	-	5.138.640.000
2	PERALATAN DAN MESIN	7.685.117.174	288.839.660	-	7.973.956.834	6.996.319.905	977.636.929
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538	-	-	5.354.291.538	5.006.165.851	348.125.687
4	JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	67.202.000	-	-	67.202.000	34.718.040	32.483.960
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	-	-	-
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	18.245.250.712	288.839.660	-	18.534.090.372	12.037.203.796	6.496.886.576

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007

PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
 DAFTAR RINCIAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
 31 Desember 2023

NAMA PERANGKAT DAERAH : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	KETERANGAN	3	4	5	8	9=(4+5+6-7-8)	10	11 = (9-10)	Mutasi Tambah		Mutasi Kurang		Akumulasi Penyusutan s.d 31-Dec-2023	Nilai Buku Per 31-Dec-2023
									Belanja Modal TA.2023 yang tidak di Kapitalisasi (Tidak menjadi Aset Tetap)	Belanja Modal TA.2023 yang menjadi Aset Tetap	Penerimaan dari OPD Lain (Mutasi Masuk antar OPD)	Jumlah		
1	TANAH	5.138.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	18 = (11+12+13+14+15+16+17)	19	3+20+21+22+23	27	28=(26-27)
2	PERALATAN DAN MESIN	7.685.117.174,00	288.839.660,00	288.839.660,00	0,00	288.839.660,00	0,00	288.839.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996.319.905,00	5.138.640.000,00
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	5.354.291.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.839.660,00	0,00	0,00	5.006.165.861,00	977.636.929,00
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	67.202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.719.040,00	348.125.687,00
5	ASET TETAP LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.483.980,00
6	KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	18.245.260.712,00	288.839.660,00	0,00	0,00	288.839.660,00	0,00	288.839.660,00	0,00	288.839.660,00	0,00	0,00	12.037.203.796,00	6.496.886.576,00
	Jumlah Aset Tetap													
	Perseediaan													
	Aset Lainnya - Aset Tak Berwujud													
	Aset Lainnya - Aset Lain - Lain													
	Jumlah													
	Keterangan Untuk Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi													
	Beban Perseediaan													
	Beban Jasa													
	Beban Pemeliharaan													
	Beban Lain-Lain													
	Jumlah													

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

AGUNG PERMANA, S.Sos.
 NIP. 19750101 200801 1 007

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
DAFTAR MUTASI AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TEAP
31 Desember 2023

NO	KUMULASI PENYUSUTAN	SALDO AWAL 2023 (Rp)	PENAMBAHAN				PENGURANGAN						SALDO AKHIR PER 31-Dec-2023 (Rp)		
			KOREKSI (Rp)	MUTASI MASUK/KLASIFIKASI (Rp)	BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN (Rp)	Hibah/Pengakuan Penerimaan Lainnya yang Sah (Rp)	JUMLAH (Rp)	KOREKSI (Rp)	MUTASI KELUAR (Rp)	REKLASIFIKASI (Rp)	Hibah/Pengakuan Pengeluaran Lainnya yang Sah (Rp)	JUMLAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = 4+5+6+7+8	10	11	12	13	14	15 = 10+11+12+13+14	16 = 3+9-15
1	AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	6.449.282.280				566.355.795		566.355.795	19.318.180					19.318.180	6.986.319.905
2	AKUMULASI PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	4.952.112.843				54.053.208		54.053.208						0	5.006.165.851
3	AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN	31.357.908				3.360.132		3.360.132						0	34.718.040
4	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP LAINNYA	0				0		0						0	0
	JUMLAH	11.432.752.841	0	0	0	623.769.135	0	623.769.135	19.318.180	0	0	0	0	19.318.180	12.037.203.796
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET LAINNYA					0		0						0	0
	AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP DAN ASET LAINNYA	11.432.752.841	0	0	0	623.769.135	0	623.769.135	19.318.180	0	0	0	0	19.318.180	12.037.203.796

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19760101 200801 1 007

PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN KETERKAITAN LRA, LO, DAN NERACA
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 TA. 2023

Kode Rekening LRA	URAIAN LRA	BERTAMBAH					BERKURANG							Jumlah	BEBAN TAHUN 2023	BEBAN TAHUN 2022				
		REKLASIFIKASI	TIDAK DARI PEMERINTAH PUSAT/DAERAH LAINNYA/ORGANISASI DILUAR PEMPR OV JABAR	BELANJA MODAL YANG TIDAK DIKAPIT ALISASI	HIBAH KE PEMKAB/PEMKTOR/GANISASI	SALDO KEWAJIBAN PER 31-Dec-2023	BEBAN PENURUNAN NILAI INVESTASI	Jumlah	SALDO KEWAJIBAN PER 31-Dec-2022	BELANJA YANG MENJADI PERSEDIAAN	KAPITAL ISASI MENJADI IASET	PIUTANG BAGI HASIL KE KABUPATEN ENIKOTA	REKLASIFIKASI ANTAR BEBAN				REKLASIFIKASI BEBAN MENJADI PIUTANG	PAJAK		
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
	BEBAN PEGAWAI																			
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.443.114.157	-	-	-	-	-	-	-	2.421.432	-	-	-	-	-	-	2.421.432	2.440.692.725	2.659.262.085	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	5.823.218.576	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.823.218.576	6.320.814.431	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Perimbangan Objektif Lainnya ASN	294.741.732	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294.741.732	132.599.789	
	JUMLAH	8.561.074.465	-	-	-	-	-	-	-	2.421.432	-	-	-	-	-	-	2.421.432	8.568.653.033	9.112.666.305	
	BEBAN PEMELIHARAAN																			
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Perlatan dan Mesin	207.234.288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207.234.288	391.534.375	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.192.797	
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	25.719.190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.719.190	-	
	JUMLAH	232.953.478	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	232.953.478	412.727.172	
	BEBAN PERJALANAN DINAS																			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.394.723.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.394.723.118	2.346.265.708	
	JUMLAH	2.394.723.118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.394.723.118	2.346.265.708	
	TOTAL	11.188.751.061	-	-	-	-	-	-	-	2.421.432	-	-	-	-	-	-	2.421.432	11.186.329.629	11.871.655.185	

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

AGUNG PERMANA, S.Sos.
 NIP. 19750101 200801 1 007

PROVINSI JAWA BARAT
LAPORAN KETERKAITAN LRA, LO DAN NERACA
UNTUK PERHITUNGAN BEBAN JASA
31 Desember 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Kode LRA	URAIAN LRA	LRA	BERTAMBAH			BERKURANG		JUMLAH BEBAN JASA TAHUN 2023	Beban Jasa Tahun 2022
				NILAI KEWAJIBAN YANG BELUM DIBAYAR S/D31 Dec 2023	JUMLAH BERTAMBAH	NILAI KEWAJIBAN PER 31 Dec 2022	JUMLAH BERKURANG	JUMLAH		
1		2	5	11	12	13	17	18	19	
JASA										
1.	5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor								
	5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	114.400.000,00	-	-	-	-	114.400.000	94.200.000	
	5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	21.200.000,00	-	-	-	-	21.200.000	19.000.000	
	5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	16.790.000,00	-	-	-	-	16.790.000	9.450.000	
	5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	-	-	-	-	-	0	167.700.000	
	5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	552.500.000,00	-	-	-	-	552.500.000	384.800.000	
	5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	111.800.000,00	-	-	-	-	111.800.000	111.800.000	
	5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	21.350.000,00	-	-	-	-	21.350.000	27.200.000	
	5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	386.589.661,00	-	-	-	-	386.589.661	312.403.000	
	5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	315.995.400,00	-	-	-	-	315.995.400	284.606.000	
	5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	60.734.100,00	-	-	-	-	60.734.100	-	
	5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengalihan Sampah	5.940.000,00	-	-	-	-	5.940.000	3.750.000	
	5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	83.736.226,00	8.077.761,00	8.077.761,00	5.664.279,00	5.664.279,00	86.149.728	4.440.000	
	5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	11.435.000,00	-	-	-	-	11.435.000	18.844.300	
	5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.702.470.387,00	8.077.761,00	8.077.761,00	5.664.279,00	5.664.279,00	1.704.883.889	1.513.146.019	
		JUMLAH (A)								

NO	Kode LRA	URAIAN LRA	LRA SIPKD	BERTAMBAH			BERKURANG		JUMLAH BEBAN JASA TAHUN 2023	REKLASIFIKASI
				NILAI KEWAJIBAN YANG BELUM DIBAYAR S/D31 Dec 2023	JUMLAH BERTAMBAH	NILAI KEWAJIBAN PER 31 Dec 2022	JUMLAH BERKURANG	JUMLAH		
1		2	5	11	12	13	17	18	19	
JASA										
1	5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	50.527.680,00	-	-	-	-	50.527.680	96.697.716	
4	5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.682.500,00	-	-	-	-	6.682.500	-	
11	5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	20.800.000,00	-	-	-	-	20.800.000	-	
		JUMLAH (B)	78.010.180,00	-	-	-	-	78.010.180	96.697.716	
		JUMLAH (A+B)	1.780.480.567,00	8.077.761,00	8.077.761,00	5.664.279,00	5.664.279,00	1.782.894.069,00	1.609.843.735,00	

KET: Nilai/saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 harus sama dengan nilai beban dibayar dimuka per 31 Desember 2023 pada lampiran 4
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,

AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007

PROVINSI JAWA BARAT
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI SERTA BEBAN PENYISIHAN PIUTANG
TAHUN 2023

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

URAIAN 1	BEBAN TAHUN 2023 2	BEBAN TAHUN 2022 3
A. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI		
A.1 BEBAN PENYUSUTAN		
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	566.355.795	581.066.701
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	54.053.208	54.053.208
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.360.132	3.360.132
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN	623.769.135	638.480.041
A.2. BEBAN AMORTISASI		
Beban Amortisasi	0	0
JUMLAH BEBAN AMORTISASI	0	0
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	623.769.135	638.480.041
B. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG		
Beban Penyisihan Piutang Pajak	0	0
Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang SAH	0	0
Beban Penyisihan Piutang Lainnya PPKD	0	0
JUMLAH BEBAN PENYISIHAN PIUTANG	0	0

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
PERBANDINGAN REALISASI BELANJA MODAL NERACA DAN LRA
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Per 31 December 2023

NO	URAIAN	LRA	NERACA	SELISIH	KETERANGAN
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)
1	TANAH	-	-	-	
2	PERALATAN DAN MESIN	288.839.660,00	288.839.660,00	-	
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	-	-	-	
4	JALAN IRIGASI DAN JARINGAN	-	-	-	
5	ASET TETAP LAINNYA	-	-	-	
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-	
7	ASET LAINNYA	-	-	-	
	JUMLAH	288.839.660,00	288.839.660,00	-	

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan,



AGUNG PERMANA, S.Sos.
NIP. 19750101 200801 1 007